

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Temanggung



2025
-
2029



Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung Kode Pos 56218

Telepon/Faximili (0293) 491059

surat elektronik: dppppappkb@temanggungkab.go.id laman: dppppappkb.temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya semata, maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029. Renstra DPPPAPPKB merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut/penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai Tahun 2025 sampai Tahun 2029.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf DPPPAPPKB mempunyai tekad akan melaksanakan pokok-pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 melalui program dan kegiatan dalam Renstra.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dalam implementasinya. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Temanggung, maka seluruh jajaran DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung akan senantiasa komitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis DPPPAPPKB Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA DPPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700730 199001 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS DPPPAPPKB.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPPAPPKB	9
2.1.2 Sumber Daya DPPPAPPKB	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB	19
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	24
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPPPAPPKB.....	29
3.2 Strategi	32
3.3 Arah Kebijakan	34
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB V PENUTUP	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra DPPPAPPKB	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPPPAPPKB	16
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	29
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	30
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana DPPPAPPKB	18
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPPPAPPKB	19
Tabel 2.3	Capaian Indikator SPM	20
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama DPPPAPPKB.....	20
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Kunci DPPPAPPKB	21
Tabel 2.6	Permasalahan dan Isu Strategis	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPPPAPPKB.....	31
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra DPPPAPPKB.....	32
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra DPPPAPPKB	35
Tabel 4.1	Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	37
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	44
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	69
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	98
Tabel 4.5	Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kabupaten/Kota.....	99
Tabel 4.6	Daftar Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional	101
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB	107
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Kunci DPPPAPPKB.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

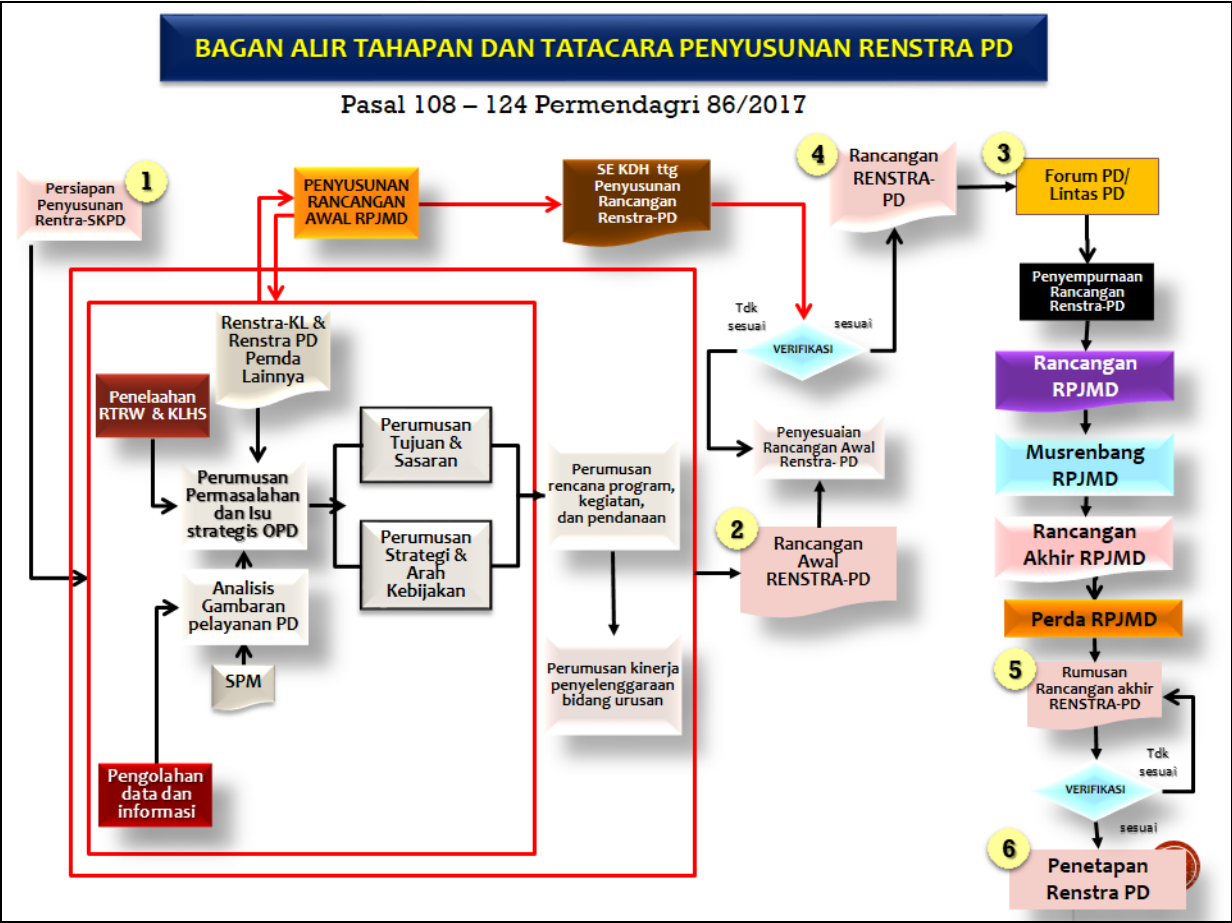
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAAPKB) merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Keberadaan DPPPAAPKB menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, perempuan, anak, serta keluarga

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Maksud disusunnya Renstra DPPPAPPKB adalah berikut:
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra DPPPAPPKB adalah:
- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh DPPPAPPKB sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah;
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPPPAPPKB adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DPPPAPPKB

2.1 Gambaran Pelayanan DPPPAPPKB:

2.1.1. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi DPPPAPPKB

2.1.2. Sumber daya DPPPAPPKB

2.1.3. Kinerja pelayanan DPPPAPPKB

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

2.2 Sub bab permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

2.2.1. Permasalahan pelayanan DPPPAPPKB

2.2.2. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan sasaran renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029

3.2. Strategi DPPPAPPKB dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DPPPAPPKB Tahun 2025-2029

3.3. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DPPPAPPKB tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian program

4.2 Uraian kegiatan

4.3 Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra
DPPPAPPKB Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja
utama (IKU) DPPPAPPKB

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci
(IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DPPPAPPKB

2.1 Gambaran Pelayanan DPPPAPPKB

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPPAPPKB

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi DPPPAPPKB

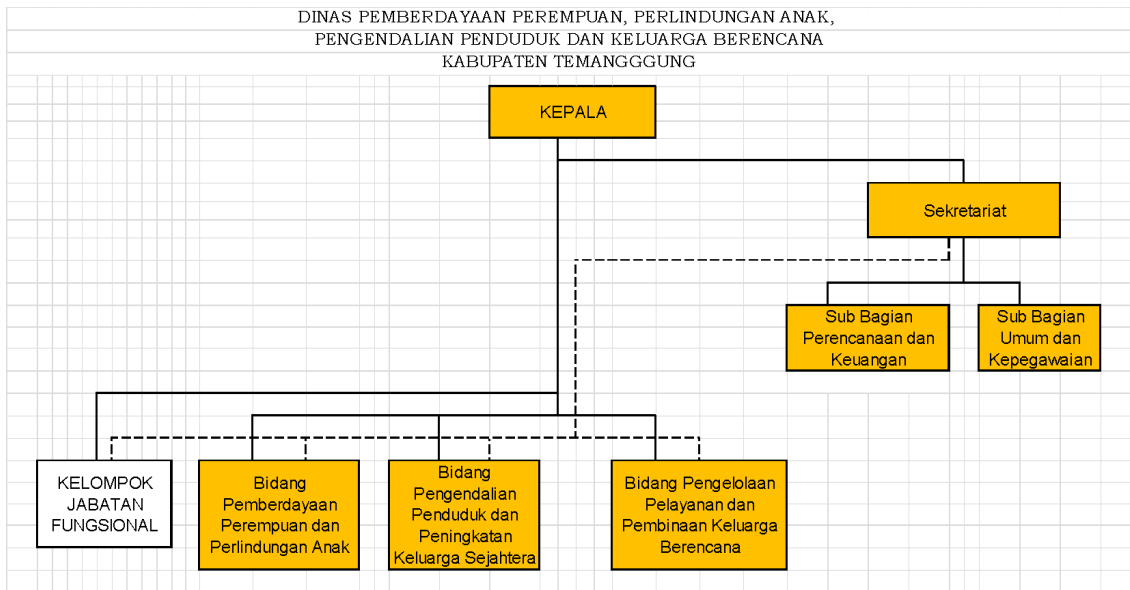
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugasnya, DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategis dan keterpaduan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan dinas;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- f. Pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.



Uraian tugas dan fungsi Kepala DPPAPKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas PPPAPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- f. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu 2 sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a. Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- b. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- d. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- f. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- j. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- l. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- m. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan

gender, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 1. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; dan
 2. Sub Koordinator Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator meliputi:

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
- b. Sub Koordinator Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB

Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan pelayanan dan pembinaan KB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pelayanan KB, pemenuhan kebutuhan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta pergerakan, pembinaan, peningkatan kesertaan ber-KB;
- penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB sebagaimana, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator, sesuai struktur organisasi yaitu:

- 1) Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- 2) Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

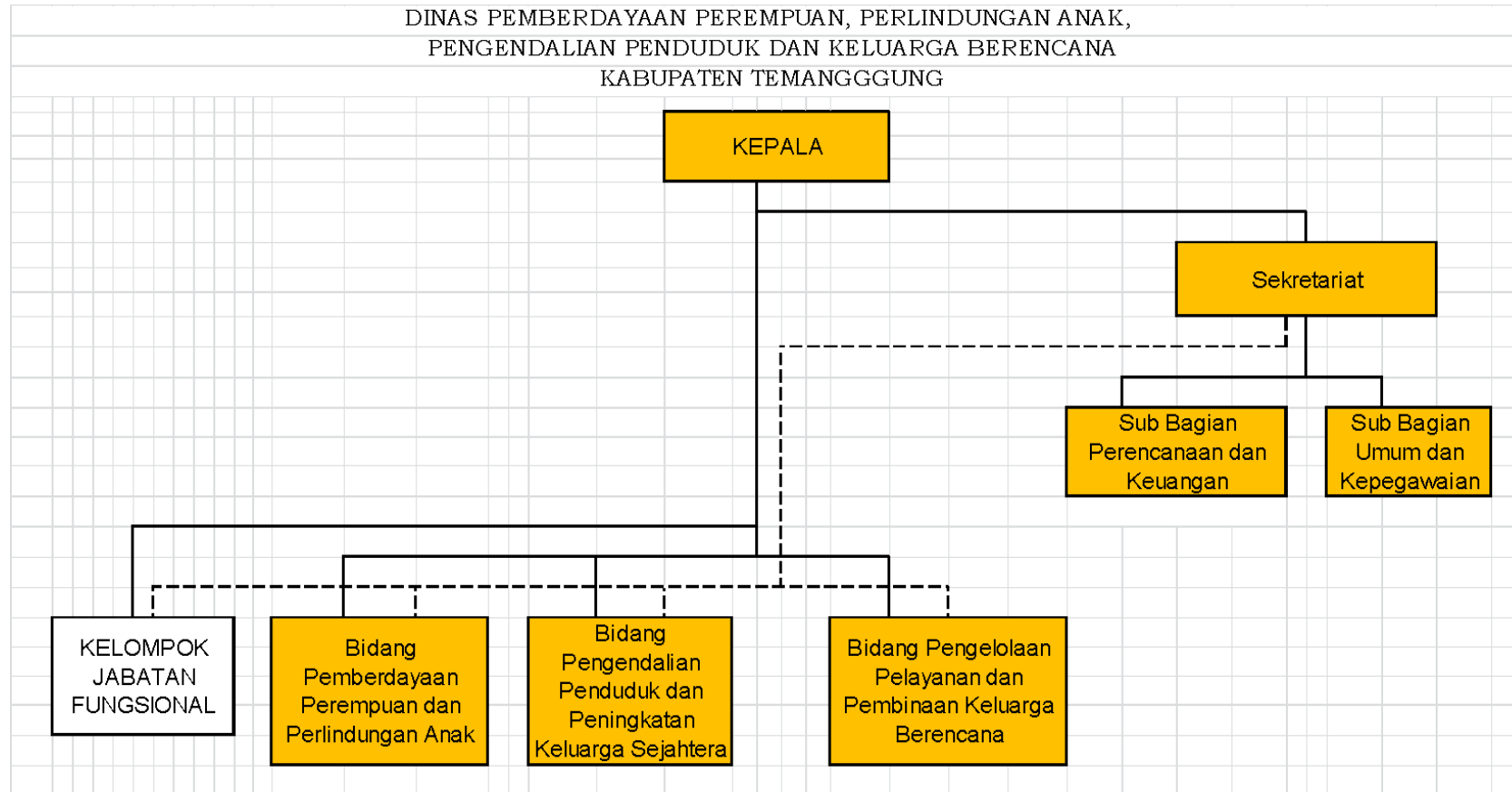
6. Tugas Pokok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan .

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (3) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Struktur Organisasi DPPPAPPKB

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi DPPPAPPKB Berikut gambar struktur organisasi DPPPAPPKB:



Gambar 2.1
Struktur
Organisasi
DPPPAPPKB
Kabupaten
Temanggung

2.1.2 Sumber Daya DPPPAPPKB

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada DPPPAPPKB disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana DPPPAPPKB

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)									GOLONGAN/PANGKA T*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SMP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																	
Eselon 2								1									
Kepala Perangkat Daerah								1					1		1		
Eselon 3																	
Sekretaris								1					1			1	
Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																	
Kabid Pengendalian Penduduk Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera								1					1			1	
Kabid Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Keluarga Berencana							1						1			1	
Eselon IV																	
Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan							1					1					1
Kasubbag Umum Dan Kepegawaian																	
Jabatan Fungsional						2	4	1			2	4	2				5
Pelaksana	1	1	5		1	2	4	1		2	5	8					
CPNS						1	1										
PPPK							4										
Jumlah	1	1	5		1	5	14	4		2	3	10	4		1	3	6

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja DPPPAPPKB dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPPPAPPKB

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	3 Bidang	475.469.141	Eks BKKBN, Eks Dinsos, Gudang Arsip, Balai Penyuluh Kec. Jumo dan Kec. Bejen
2	Gedung	39 Gedung	9.321892.452	Eks BKKBN, Eks Dinsos, Gudang Arsip, 20 Balai Penyuluhan, Selasar 1, Tempat Ibadah 1, Pagar Permanen 8
3	Alat – alat Angkutan	86 Unit	8.648.406.845	Sepeda Motor 80, Mobil 8
4	Alat – alat Perkantoran	1785 Buah	171.036.175	Atk dll

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, DPPPAPPKB telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya DPPPAPPKB, tidak ada kinerja Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 2.3 Capaian Indikator SPM							
No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
NIHIL							

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4 Capaian indikator kinerja Utama DPPPAPPKB							
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	n.a	n.a	n.a	n.a	80,62	Indikator ini baru ada target di tahun 2024
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	100	100	100	100	73,02	Data dari BPS

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Dari tabel 2.4 di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian dari IKU yang terdiri dari 2 sasaran yang meliputi:

1. Meningkatkan Kebijakan Responsif Gender

Meningkatnya Kebijakan Responsif gender adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan nilai dari Persentase Perangkat Daerah dalam menyusun rencana Kegiatan Anggaran yang responsif Gender. Indikator sasaran ini pada Renstra tahun 2018 – 2023, belum menjadi target DPPPAPPKB, namun menjadi Indikator Kinerja Keluaran (IKK).

Target tahun 2024 sebesar 10,20 berdasarkan hasil realisasi IKK pada tahun sebelumnya sebesar 10,18. Hasil realisasi sasaran ini tidak sesuai dengan harapan karena realisasi tercapai 8,22 atau 80, 62% dari target 10,20

2. Pertumbuhan penduduk yang terkendali

Pengukuran capaian kinerja DPPPAPPKB Tahun 2024 untuk sasaran strategis pertumbuhan penduduk yang terkendali dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi tahun 2024 dan realisasi dari target (rencana).

Untuk Pencapaian LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) di Kabupaten Temanggung belum sesuai dari yang diharapkan karena dibandingkan target yang ada, realisasi capaian kinerja sampai tahun 2024 realisasinya 0,8 atau 73,20% dari target 0,63 .Untuk perhitungan LPP, Dinas PPPAPKB masih menggunakan perhitungan dari BPS, namun masih ada upaya untuk mencapai target yang ada

2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,30	4,37	10,16	12,97	8,22	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0053	0,003	0,001	0,000012	2,942	
4	TFR (<i>Total Fertility Rate</i> /Angka Kelahiran Total)	2,3	1,32	2,1	1,58	1,55	
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	74,71	76,58	75,7	80,14	81,85	
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	13,76	11,47	11,93	8,60	7,60	

Sumber: DPPPAPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Dari tabel 2.5 di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian dari IKK yang terdiri dari 5 indikator yang meliputi:

1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja

Capaian Indikator Kinerja Kunci presentase ARG pada belanja Operasional dan Modal APBD pada tahun 2024, realisasi menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya, hal ini dikarena ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah :

- a. Belum tersusunnya RAD pengarusutamaan gender dan kurangnya pembekalan penyusunan ARG bagi Tim Teknis maupun Tim *Focal Point*;
- b. Belum semua proses perencanaan kegiatan yang berbasis anggaran menggunakan analisa GAP dan GBS.

a. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani

Capaian indikator dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, capaiannya 100%, karena semua kasus yang melapor, semua

ditangani dan didampingi. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya:

- a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak;
- b. Minimnya pelaporan karena anak sering kali tidak berani melapor karena takut, malu, atau merasa tidak akan dipercaya; dan
- c. Kurangnya shelter, psikolog anak, pendamping hukum, dan tenaga profesional yang memadai dalam penanganan kasus.

b. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Capaian rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPQ, naik turun. Jumlah Kasus selalu fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kasus tersebut. Kasus kekerasan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang melapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan, dan sebagian kasus pelaku kejahatan maupun kekerasan adalah dari keluarga terdekat atau juga dari lingkungannya, yang mana penyelesaian kasus cukup diselesaikan di tingkat desa, dan tidak dilaporkan di tingkat kabupaten.

c. TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total)

TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total), yaitu banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15–49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15–49 tahun pada periode yang sama.

Capaian TFR dikabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun ini semakin menurun atau semakin membaik. Dari capaian tahun 2024 tercapai 1,55, artinya seorang wanita usia antara 1–49 tahun, rata rata anak yang dilahirkan antara 1-2 anak. Faktor yang mempengaruhi capaian ini adalah:

a. Faktor sosial budaya

- Penundaan usia perkawinan
- Perubahan nilai budaya dari nilai tradisional menuju individualistik
- Gaya hidup urban, banyak anak banyak beban hidup di kota

b. Faktor Ekonomi

- Tingginya biaya hidup, biaya pendidikan, perumahan dan kesehatan, serta orang cenderung mempunyai anak sedikit;
- Perempuan pekerja, Perempuan yang aktif secara ekonomi cenderung menunda atau membatasi jumlah anak.

c. Kebijakan Pemerintah

- Kebijakan Program Keluarga Berencana
- Faktor kesehatan dan Teknologi
- Akses terhadap kontrasepsi, ketersediaan alat kontrasepsi yang luas mempermudah pengendalian kelahiran.

d. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)

Capaian penggunaan alat kontrasepsi, dari tahun ke tahun semakin naik, hal ini karena adanya peningkatan komunikasi edukasi dan Informasi pada masyarakat tentang perlunya penggunaan alat kontrasepsi. Capaian penggunaan alat kontrasepsi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB dan mobilitas media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi dan *side effect*.

e. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Capaian Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), adalah jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi dari tahun ketahun semakin menurun, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- Meningkatnya kegiatan KIE kepada PUS untuk Ber-KB;
- Meningkatnya koordinasi kepada KKB (Klinik Keluarga Berencana) dalam pelayanan KB;

- Ketersediaan dan variasi alat kontrasepsi, murah dan gratis; dan
- Perempuan dan pasangan menyadari pentingnya jarak kehamilan dan jumlah anak yang ideal.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPPAPPKB memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan DPPAPPKB adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Pelayanan Penjangkauan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Pelayanan Mediasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Pelayanan Rujukan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Pelayanan Konsultasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja) Tingkat Kecamatan di Balai Penyuluhan KB; dan
- f. Pelayanan Distribusi (Droping) alat dan obat kontrasepsi.

Untuk point a sampai point d, dalam rangka pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak DPPAPPKB berkerja sama dengan P2TP2A dan Sentra Terpadu Kartini RSU, RSK dan PKU Muhammadiyah.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka DPPAPPKB juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian, Komando Rayon Militer, dan organisasi masyarakat di tingkat kabupaten.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPPAPPKB antara lain:

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

1. Belum tersedianya data pilah gender sebagai dasar penyusunan anggaran responsif gender;
2. Masih kurangnya koordinasi Pokja Pengarustamaan Gender dalam pelaksanaan evaluasi dan review penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG);
3. Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Belum terbentuknya Satgas Perlindungan Perempuan Anak (PPA);
5. Belum terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak; dan
6. Belum terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih tingginya laju pertumbuhan Penduduk;
2. Belum optimalnya pencapaian tingkat kesuburan Total (*Total Fertility Rate*);
3. Masih rendahnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
4. Masih tingginya PUS di bawah umur 20 tahun;
5. Masih tingginya Median usia kawin pertama;

6. Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA);
7. Masih tingginya keluarga beresiko Stunting;
8. Rasio jumlah Penyuluh KB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan, karena saat ini jumlah Penyuluh KB dengan jumlah desa yang ada, 1 PKB membina 8 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa.

3.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan perangkat daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung. Faktor pelayanan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi DPPAPPKB. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan pembangunan sosial : jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Belum Tersedianya data pilah sebagai dasar penyusunan Anggaran Responsif Gender	Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal	Kesetaraan Gender	Rendahnya Sumber Daya Manusia	1) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 2) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat 3) Perubahan sosial budaya masyarakat	Rendahnya penyusunan anggaran responsif gender
Besarnya jumlah kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usi muda yang besar, hal ini	Masih kurangnya koordinasi Pokja Pengarustamaan Gender dalam pelaksanaan evaluasi dan review penyusunan Anggaran Responsif Gender					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
jika memiliki daya beli yang tinggi						
Produktivitas tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan, yang dapat menjadi instrument mencegah kondlik dan memperkuat kerukunan dan persatuan	Belum Optimalnya Jejaring Lembaga Pengelola dalam penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.					Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Belum terbentuknya Satgas PPPA					
	Belum terbentuknya UPT PPPA					
	Masih tingginya laju pertumbuhan Penduduk					Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi terhadap KB pasca persalinan
	Belum optimalnya pencapaian tingkat kesuburan total (<i>Total Fertility Rate</i>)					
	Masih rendahnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP					
	Masih tingginya PUS di bawah umur 20 tahun					
	Masih tingginya Median usia kawin pertama					Masih tingginya prevalensi stunting
	Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA).					
	Rasio jumlah Penyuluh KB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa					

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 2.6 tersebut maka isu strategis DPPPAPPKB tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya penyusunan anggaran responsif gender;
2. Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi terhadap KB pasca persalinan; dan
4. Masih tingginya prevalensi stunting.

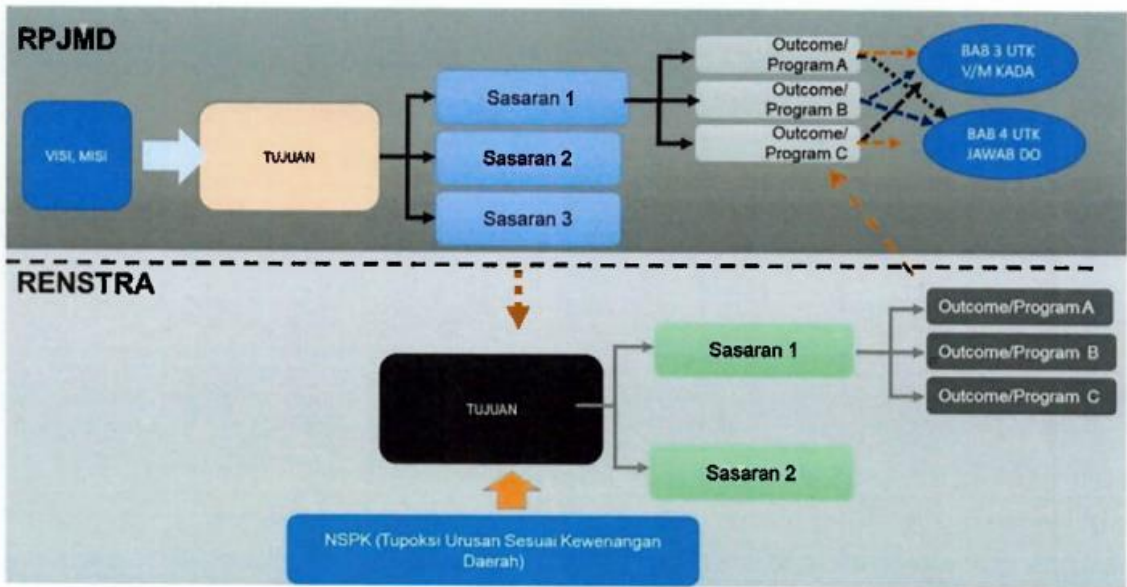
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan DPPAPPKB diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) DPPAPPKB

[illegible]

29

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPPPAPPKB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,22	0,21	0,201	0,191	0,182	0,172	0,162	
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (Angka)	63,17	63,98	64,79	65,6	66,41	66,63	68,07	
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (Angka)	74,28	74,31	74,35	74,5	74,68	74,8	74,95	
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya keluarga berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,8	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	
			TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) (Angka)	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	68,16	70,05	71,65	71,7	71,85	71,97	72	
			Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85,18	85,2	85,45	85,76	85,81	85,92	86	

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh DPPAPPKB dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi DPPAPPKB tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra DPPAPPKB

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pembentukan Satgas PPA ditingkat Kecamatan dan Desa	Monitoring dan Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di lokus	Monitoring dan Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di lokus	Berkurangnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak secara signifikan	Berkurangnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak secara signifikan
Asistensi dan Peningkatan Kapasitas satgas PPPA di Kecamatan dan Desa	Asistensi dan Peningkatan Kapasitas pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di sekolah, komunitas, dan desa	Asistensi dan Peningkatan Kapasitas pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di sekolah, komunitas, dan desa	Meningkatnya kesadaran masyarakat di akar rumput terkait dengan kekerasan pada perempuan dan anak	Meningkatnya kesadaran masyarakat di akar rumput terkait dengan kekerasan pada perempuan dan anak
Membangun kerjasama dalam pendampingan, penanganan, layanan konseling korban kekerasan	Melakukan pendampingan, penanganan, layanan konseling korban kekerasan	Melakukan pendampingan, penanganan, layanan konseling korban kekerasan	Layanan pendampingan, konseling serta penanganan trauma yang memenuhi standar	Layanan pendampingan, konseling serta penanganan trauma yang memenuhi standar
Pembentukan UPTD terkait penangan kekerasan perempuan dan anak	Membangun kerjasama dalam pendampingan, penanganan, layanan konseling korban kekerasan	Melakukan pendampingan, penanganan, layanan konseling korban kekerasan	Layanan pendampingan, konseling serta penanganan trauma yang memenuhi standar	Layanan pendampingan, konseling serta penanganan trauma yang memenuhi standar
Memperluas KIE yang menarik menggunakan media konvensional dan populer sesuai segmen target	Memperluas KIE yang menarik menggunakan media konvensional dan populer sesuai segmen target	Memperluas KIE yang menarik menggunakan media konvensional dan populer sesuai segmen target	Meningkatnya pemahaman dan keterlibatan publik secara aktif dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak	Meningkatnya pemahaman dan keterlibatan publik secara aktif dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan yang dikelola oleh UPTD	Pemeliharaan dan penyediaan fasilitas layanan rumah aman bagi korban kekerasan	Pemeliharaan dan penyediaan fasilitas layanan rumah aman bagi korban kekerasan	Rumah aman bagi korban kekerasan memiliki standar pelayanan penanganan korban yang sesuai dengan standar perlindungan korban	Rumah aman bagi korban kekerasan memiliki standar pelayanan penanganan korban yang sesuai dengan standar perlindungan korban
Melakukan pengembangan pilot forum perempuan dan anak di desa	Melakukan replikasi pilot forum perempuan dan anak didesa	Melakukan replikasi pilot forum perempuan dan anak didesa	Forum perempuan dan anak yang berperan sebagai mitra pembangunan pemda dan pemdes dalam mengawal isu perempuan dan anak	Forum perempuan dan anak yang berperan sebagai mitra pembangunan pemda dan pemdes dalam mengawal isu perempuan dan anak
Melakukan pengembangan pilot forum perempuan dan anak di desa	Melakukan replikasi pilot forum perempuan dan anak didesa	Melakukan replikasi pilot forum perempuan dan anak didesa	Terbentuknya komunitas perempuan wirausaha yang memiliki kontribusi dalam pengembangan ekonomi keluarga maupun desa	Terbentuknya komunitas perempuan wirausaha yang memiliki kontribusi dalam pengembangan ekonomi keluarga maupun desa
Membangun kerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan rumah aman	Penyediaan rumah aman yang dikelola oleh UPTD	Pemeliharaan dan penyediaan fasilitas layanan rumah aman	Pemeliharaan C penyediaan fasilitas layanan rumah aman	Rumah aman memiliki standar pelayanan penanganan korban yang sesuai dengan standar perlindungan korban
Melakukan pengembangan pilot pemberdayaan ekonomi perempuan di desa	Melakukan replikasi pilot pemberdayaan ekonomi perempuan di desa	Melakukan replikasi pilot pemberdayaan ekonomi perempuan di desa	Terbentuknya komunitas perempuan wirausaha yang memiliki kontribusi dalam pengembangan ekonomi keluarga maupun desa	membangun kemitraan dengan pihak ketiga, dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan ekonomi perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga
Mengintegrasikan mekanisme pelaporan melalui SuperApps	Mendorong Penggunaan dan Pemanfaatan Pelaporan dan	Mendorong Penggunaan dan Pemanfaatan Pelaporan dan konseling melalui	Meningkatnya pemanfaatan apps baik untuk pelaporan	Meningkatnya pemanfaatan apps baik untuk pelaporan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	konseling melalui SuperApps di sekolah	SuperApps di sekolah	maupun untuk tele konseling	maupun untuk tele konseling
ujicoba sistem pelaporan dan konseling melalui superApps	Mendorong Penggunaan & Pemanfaatan Pelaporan & konseling melalui SuperApps di sekolah	Mendorong Penggunaan & Pemanfaatan Pelaporan & konseling melalui SuperApps di sekolah	Meningkatnya pemanfaatan apps baik untuk pelaporan maupun untuk tele konseling.	Meningkatnya pemanfaatan apps baik untuk pelaporan maupun untuk tele konseling.
Sosialisasi melalui media sosial, dll	Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat	Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat	Terbangunnya kesadaran dan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	Terbangunnya kesadaran dan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak
Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat	Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat	Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat	Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat	Diseminasi Penggunaan SuperApps & Hotline pelaporan ke Masyarakat

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan DPPPAPPKB tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.3.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra DPPPAPPKB

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPPPAPPKB	Keterangan
1	NSPK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan peran dan perlindungan perempuan	
			Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	
2	Sasaran RPJMD yang relevan: Sasaran 2 Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Peningkatan pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
		Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, agama dan keluarga berencana)	Pengendalian Laju Pertumbuhan, mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ketahanan Keluarga	

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra DPPPAPPKB, diharapkan mampu menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan Tujuan DPPPAPPKB secara terukur, terarah dan responsif terhadap perubahan zaman.

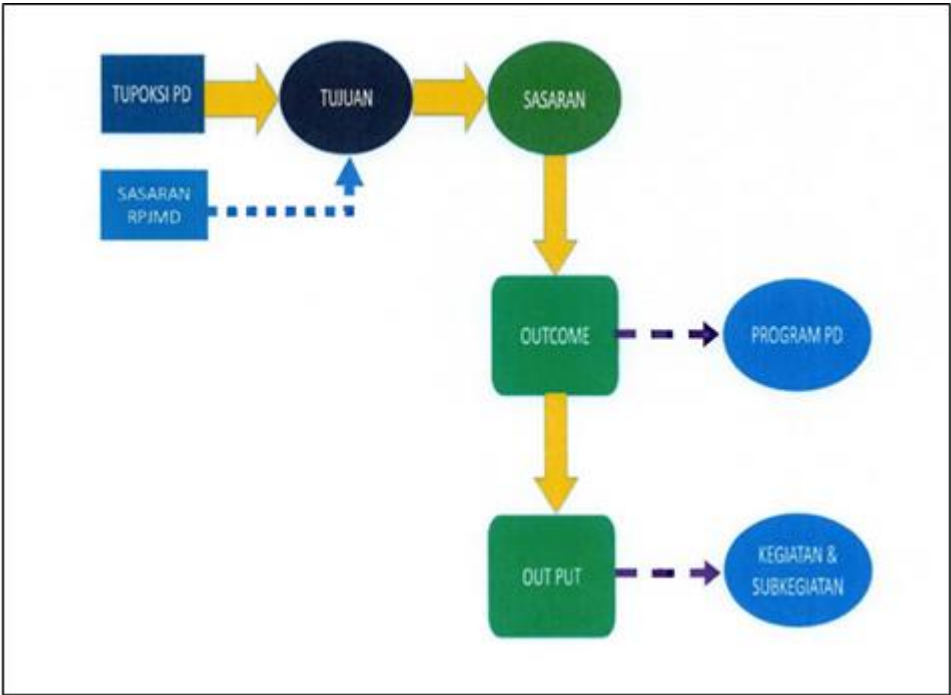
Arah Kebijakan Renstra DPPPAPPKB, dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, terutama misi ke-3 yaitu Pemberdayaan melalui pendidikan dan Kesehatan dan mendukung sasaran RPJMD, sasaran ke dua yaitu Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan DPPAPPKB sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.600.270.242		4.635.192.058		4.708.732.222		4.845.508.593		4.830.161.994	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.150.270.242		4.184.877.058		4.252.157.845		4.380.350.616		4.364.678.407	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	4.150.270.242	100	4.184.877.058	100	4.252.157.845	100	4.380.350.616	100	4.364.678.407	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	8,22	9,21	9,7	30.000.000	10	30.021.000	10,2	30.438.292	10,4	31.010.532	10,5	31.032.239	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Anak
	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah (%)	2,27	2,3	2,35		2,4		2,45		2,5		2,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.079	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani (%)	100	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.079	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Angka)	56,393	5,39	5,15				4,9				4,66		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					320.000.000		320.224.000		324.675.113		330.779.006		331.010.551	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas (%)	65,38	69,23	73,08	320.000.000	84,61	320.224.000	92,3	324.675.113	96,15	330.779.006	100	331.010.551	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					80.000.000		80.056.000		81.168.778		82.694.751		82.752.638	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Kabupaten Layak Anak (Kategori)	Madya	Madya	Madya	80.000.000	Madya	80.056.000	Nindya	81.168.778	Nindya	82.694.751	Nindya	82.752.638	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Prosentase terbentuknya DRPPA (%)	2,42	2,47	30,1		43,94		57,79		71,63		85,47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	61,62	62,2	63,2	10.000.000	64,7	10.007.000	66	10.146.097	67,21	10.336.844	68,19	10.344.080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pernikahan usia anak (%)	0,124	0,105	0,092		0,084		0,075		0,067		0,059		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Rasio kasus kekerasan terhadap anak (Angka)	9,37	8,93	8,48		8,03		7,59		7,14		6,69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					12.252.870.650		12.261.447.659		12.431.881.783		12.665.601.159		12.723.080.669	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					493.800.000		494.145.660		501.014.285		510.433.353		510.790.657	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Angka)	58,6	58,7	58,8	493.800.000	58,9	494.145.660	59	501.014.285	59,1	510.433.353	59,2	510.790.657	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7,6	7,59	7,58		7,57		7,56		7,55		7,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Median usia kawin pertama (MUKP) (Angka)	19,8	19,9	20,1		20,2		20,3		20,4		20,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) (%)	9,48	9,32	9,22		9,09		8,96		8,83		8,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					7.494.989.000		7.500.235.492		7.604.488.766		7.747.453.154		7.801.489.960	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (%)	46,45	46,7	46,95	7.494.989.000	47,2	7.500.235.492	47,45	7.604.488.766	47,7	7.747.453.154	47,95	7.801.489.960	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	77,5	77,7	77,8		78,25		78,45		79,75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase KB pasca persalinan (%)	52,42	57,4	59,9		62,9		64,9		68,1		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri (%)	14,88	15,22	15,91		16,6		17,3		18		18,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4.264.081.650		4.267.066.507		4.326.378.732		4.407.714.652		4.410.800.052	
meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita (%)	45,53	45,56	45,75	4.264.081.650	45,95	4.267.066.507	45,97	4.326.378.732	45,99	4.407.714.652	46,03	4.410.800.052	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Angka)	87,23	87,3	87,4		87,5		87,6		87,7		87,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks lansia berdaya (Angka)	57,83	57,9	58		58,1		58,2		58,3		58,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
TOTAL KESELURUHAN					16.853.140.892		16.896.639.717		17.140.614.005		17.511.109.752		17.553.242.663	

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Meningkatkan Kualitas Hidup, Perempuan, Anak, serta Keluarga	Meningkatnya kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
					Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (Angka)		
					Indeks Pemberdayaan Gender (Angka)		
					Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksana Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak			Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak (%)		
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Terlaksannya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Angka)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas (%)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Terlaksanannya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif		Kabupaten Layak Anak (Kategori)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Prosentase terbentuknya DRPPA (%)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Persentase pernikahan usia anak (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Rasio kasus kekerasan terhadap anak (Angka)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksannya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya keluarga berkualitas			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		
					TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) (Angka)		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Angka)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Terlaksannya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Median usia kawin pertama (MUKP) (Angka)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) (%)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			berencana (KB)				
					Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase KB pasca persalinan (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Terlaksannya advokasi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Terlaksannya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				(PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksannya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terlaksannya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)		Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Angka)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks lansia berdaya (Angka)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksannya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksannya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				terlaksananya penyusunan dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa dalam rangka mencapai tujuan DPPPAPPKB, ditetapkan sasaran DPPPAPPKB, yaitu:

A. Meningkatnya Kesenjangan Gender

Upaya ini dilakukan dalam rangka

1. Mendorong tercapainya kesetaraan gender secara lebih merata diberbagai sektor.yang diukur dengan **Indeks Pemberdayaan Gender**. Adapun tujuan dan harapan pengukuran untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di suatu negara atau daerah. Indeks ini menyoroti kesenjangan gender dalam hal partisipasi, akses, dan kontrol terhadap sumber daya serta posisi pengambilan keputusan.

Rencana Program untuk mendukung sasaran ini adalah:

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Program ini diarahkan pada implementasi PUG dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, serta pemberdayaan perempuan dan persentase keterwakilan perempuan yang bekerja di lembaga Pemerintah .

2. Menurunkan persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Rencana Program untuk mendukung sasaran ini adalah :

a. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan terutamanya penanganan korban kekerasan pada perempuan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani.

b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga.

c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak agar menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

d. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada Meningkatnya kualitas

perlindungan khusus anak terutama penanganan anak yang menjadi korban kekerasan.

Dalam rangka mencapai kinerja program, juga dibutuhkan kegiatan, sub kegiatan yang berbasis pada anggaran yang tersedia.

B. Meningkatnya Keluarga Berkualitas

Upaya ini dilakukan dalam rangka

1. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (sekitar usia 15-49 tahun).

Rencana Program untuk mendukung sasaran ini adalah :

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada peningkatan kepesertaan KB di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan tabel 4.2 (Tabel rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan) Tahun 2025 – 2029, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program telah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah pada DPPPAPPKB. Untuk mendukung capaian sasaran. Program dan kegiatan DPPPAPPKB yang telah disesuaikan dengan nama kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Kemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mencapai kinerja program, juga dibutuhkan kegiatan, sub kegiatan yang berbasis pada anggaran yang direncanakan, yang dijabarkan pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.600.270.242		4.635.192.058		4.708.732.222		4.845.508.593		4.830.161.994		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.150.270.242		4.184.877.058		4.252.157.845		4.380.350.616		4.364.678.407		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	4.150.270.242	100	4.184.877.058	100	4.252.157.845	100	4.380.350.616	100	4.364.678.407	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
terlaksananya penyusunan dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.353.154.722		3.374.761.538		3.440.042.325		3.563.235.096		3.547.562.887		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	31	3.353.154.722	31	3.374.761.538	32	3.440.042.325	32	3.563.235.096	33	3.547.562.887		
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.353.154.722		3.374.761.538		3.440.042.325		3.563.235.096		3.547.562.887		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	31	3.353.154.722	31	3.374.761.538	32	3.440.042.325	32	3.563.235.096	33	3.547.562.887		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				55.949.520		56.949.520		58.949.520		58.949.520		58.949.520		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	55.949.520	12	56.949.520	12	58.949.520	12	58.949.520	12	58.949.520		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3						3			
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	3	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000		2.000.000	3	2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Disediakan (Paket)														
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000			
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000			
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000			
2.08.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.000.000		11.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000			
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	11.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000			
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.949.520		26.949.520		27.949.520		27.949.520		27.949.520			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	25.949.520	12	26.949.520	12	27.949.520	12	27.949.520	12	27.949.520			
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				673.766.000		685.766.000		685.766.000		685.766.000		685.766.000			
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	673.766.000	12	685.766.000	12	685.766.000	12	685.766.000	12	685.766.000			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000		
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	32.500.000	12	32.500.000	12	32.500.000	12	32.500.000	12	32.500.000		
2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000		
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				629.266.000		641.266.000		641.266.000		641.266.000		641.266.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	629.266.000	12	641.266.000	12	641.266.000	12	641.266.000	12	641.266.000		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.900.000		65.900.000		65.900.000		70.900.000		70.900.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	65.900.000	2	65.900.000	2	65.900.000	2	70.900.000	2	70.900.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2				2		2					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	76	76				76		76					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2				2		2					
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.900.000		35.900.000		35.900.000		35.900.000		35.900.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	76	76	35.900.000	76	35.900.000	76	35.900.000	76	35.900.000	76	35.900.000		
2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
2.08.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah (%)	2,27	2,35	30.000.000	2,4	30.021.000	2,45	30.438.292	2,5	31.010.532	2,55	31.032.239	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	8,22	9,7		10		10,2		10,4		10,5			
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000		10.300.000		10.805.761		10.817.606		11.000.000		
Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	46	46	10.000.000	46	10.300.000	46	10.805.761	46	10.817.606	46	11.000.000		
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000		10.300.000		10.805.761		10.817.606		11.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	46	46	10.000.000	46	10.300.000	46	10.805.761	46	10.817.606	46	11.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000		19.721.000		19.632.531		20.192.926		20.032.239		
Terlaksanya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	40	40	20.000.000	40	19.721.000	40	19.632.531	40	20.192.926	40	20.032.239		
2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000		19.721.000		19.632.531		20.192.926		20.032.239		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	40	40	20.000.000	40	19.721.000	40	19.632.531	40	20.192.926	40	20.032.239		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.079		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Angka)	56,393	5,15	10.000.000	4,9	10.007.000	4,66	10.146.097	4,41	10.336.844	4,17	10.344.079	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.079		
Terlaksannya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	20	20	10.000.000	20	10.007.000	20	10.146.097	20	10.336.844	20	10.344.079		
2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.079		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	20	20	10.000.000	20	10.007.000	20	10.146.097	20	10.336.844	20	10.344.079		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				320.000.000		320.224.000		324.675.113		330.779.006		331.010.551		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas (%)	65,38	73,08	320.000.000	84,61	320.224.000	92,3	324.675.113	96,15	330.779.006	100	331.010.551	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				252.857.700		256.372.422		261.192.224		261.375.058		262.000.000		
Terlaksanannya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	20	20	252.857.700	20	256.372.422	20	261.192.224	20	261.375.058	20	262.000.000		
2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				252.857.700		256.372.422		261.192.224		261.375.058		262.000.000		
Terlaksanannya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	20	20	252.857.700	20	256.372.422	20	261.192.224	20	261.375.058	20	262.000.000		
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				67.142.300		63.851.578		63.482.889		69.403.948		69.010.551		
Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	67.142.300	25	63.851.578	25	63.482.889	25	69.403.948	25	69.010.551		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				67.142.300		63.851.578		63.482.889		69.403.948		69.010.551		
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	67.142.300	25	63.851.578	25	63.482.889	25	69.403.948	25	69.010.551		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				80.000.000		80.056.000		81.168.778		82.694.751		82.752.638		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Prosentase terbentuknya DRPPA (%)	2,42	30,1	80.000.000	43,94	80.056.000	57,79	81.168.778	71,63	82.694.751	85,47	82.752.638	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Kabupaten Layak Anak (Kategori)	Madya	Madya		Madya		Nindya		Nindya		Nindya			
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				80.000.000		80.056.000		81.168.778		82.694.751		82.752.638		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	1	1	80.000.000	1	80.056.000	1	81.168.778	1	82.694.751	1	82.752.638		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				80.000.000		80.056.000		81.168.778		82.694.751		82.752.638		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	1	1	80.000.000	1	80.056.000	1	81.168.778	1	82.694.751	1	82.752.638		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase pernikahan usia anak (%)	0,124	0,092	10.000.000	0,084	10.007.000	0,075	10.146.097	0,067	10.336.844	0,059	10.344.080	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	61,62	63,2		64,7		66		67,21		68,19			
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	100	100		100		100		100		100			
	Rasio kasus kekerasan terhadap anak (Angka)	9,37	8,48		8,03		7,59		7,14		6,69			
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksannya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	25	30	10.000.000	35	10.007.000	35	10.146.097	35	10.336.844	35	10.344.080		
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	25	30	10.000.000	35	10.007.000	35	10.146.097	35	10.336.844	35	10.344.080		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				12.252.870.650		12.261.447.659		12.431.881.783		12.665.601.159		12.723.080.669		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				493.800.000		494.145.660		501.014.285		510.433.353		510.790.657		
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 tahun) (%)	9,48	9,22	493.800.000	9,09	494.145.660	8,96	501.014.285	8,83	510.433.353	8,7	510.790.657	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Angka)	58,6	58,8		58,9		59		59,1		59,2			
	Median usia kawin pertama (MUKP) (Angka)	19,8	20,1		20,2		20,3		20,4		20,5			
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7,6	7,58		7,57		7,56		7,55		7,54			
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				493.800.000		494.145.660		501.014.285		510.433.353		510.790.657		
Terlaksannya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	12	493.800.000	12	494.145.660	12	501.014.285	12	510.433.353	12	510.790.657		
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	12	12		12				12		12			
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				60.000.000		60.420.000		61.265.880		62.329.000		62.329.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	12	12	60.000.000	12	60.420.000		61.265.880	12	62.329.000	12	62.329.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				217.800.000		217.800.000		217.800.000		221.938.200		222.297.733		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	12	12	217.800.000	12	217.800.000	12	217.800.000	12	221.938.200	12	222.297.733		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				216.000.000		215.925.660		221.948.405		226.166.153		226.163.924		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	12	216.000.000	12	215.925.660	12	221.948.405	12	226.166.153	12	226.163.924		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				7.494.989.000		7.500.235.492		7.604.488.766		7.747.453.154		7.801.489.960		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri (%)	14,88	15,91	7.494.989.000	16,6	7.500.235.492	17,3	7.604.488.766	18	7.747.453.154	18,68	7.801.489.960	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	77,5	77,8		78,25		78,45		79,75		80			
	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (%)	46,45	46,95		47,2		47,45		47,7		47,95			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase KB pasca persalinan (%)	52,42	59,9		62,9		64,9		68,1		70			
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.944.160.000		1.944.280.000		1.954.160.000		1.994.160.000		1.994.160.000		
Terlaksannya advokasi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	12	12	1.944.160.000	12	1.944.280.000	12	1.954.160.000	12	1.994.160.000	12	1.994.160.000		
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	20	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	20	20		20		20		20		20			
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				1.139.160.000		1.139.160.000		1.139.160.000		1.139.160.000		1.139.160.000		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	20	20	1.139.160.000	20	1.139.160.000	20	1.139.160.000	20	1.139.160.000	20	1.139.160.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	12	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				155.000.000		155.120.000		165.000.000		205.000.000		205.000.000		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	12	12	155.000.000	12	155.120.000	12	165.000.000	12	205.000.000	12	205.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	20	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				2.874.672.000		2.874.672.000		2.969.045.274		2.969.045.274		3.023.082.080		
Terlaksannya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1.928	1.928	2.874.672.000	1.928	2.874.672.000	1.928	2.969.045.274	1.928	2.969.045.274	1.928	3.023.082.080		
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)													
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				2.176.840.000		2.176.840.000		2.176.840.000		2.176.840.000		2.176.840.000		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1.928	1.928	2.176.840.000	1.928	2.176.840.000	1.928	2.176.840.000	1.928	2.176.840.000	1.928	2.176.840.000		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				697.832.000		697.832.000		792.205.274		792.205.274		846.242.080		
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	3	3	697.832.000	3	697.832.000	3	792.205.274	3	792.205.274	3	846.242.080		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				2.126.757.000		2.131.883.492		2.131.883.492		2.234.847.880		2.234.847.880		
Terlaksannya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya (Laporan)	56	63	2.126.757.000	63	2.131.883.492	63	2.131.883.492	63	2.234.847.880	63	2.234.847.880		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	6.215	6.215				6.215				6.215			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya (Laporan)	56	63				63				63			
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya				33.300.000		33.300.000		33.300.000		33.300.000		33.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	56	63	33.300.000	63	33.300.000	63	33.300.000	63	33.300.000	63	33.300.000		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2.063.307.000		2.068.433.492		2.068.433.492		2.171.397.880		2.171.397.880		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	6.215	6.215	2.063.307.000	6.215	2.068.433.492	6.215	2.068.433.492	6.215	2.171.397.880	6.215	2.171.397.880		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				30.150.000		30.150.000		30.150.000		30.150.000		30.150.000		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	56	63	30.150.000	63	30.150.000	63	30.150.000	63	30.150.000	63	30.150.000		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan				549.400.000		549.400.000		549.400.000		549.400.000		549.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
Terlaksannya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	68	68	549.400.000	68	549.400.000	68	549.400.000	68	549.400.000	68	549.400.000		
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	68	68		68		68		68		68			
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	68	68	275.000.000	68	275.000.000	68	275.000.000	68	275.000.000	68	275.000.000		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				274.400.000		274.400.000		274.400.000		274.400.000		274.400.000		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	68	68	274.400.000	68	274.400.000	68	274.400.000	68	274.400.000	68	274.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				4.264.081.650		4.267.066.507		4.326.378.732		4.407.714.652		4.410.800.052		
meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Angka)	87,23	87,4	4.264.081.650	87,5	4.267.066.507	87,6	4.326.378.732	87,7	4.407.714.652	87,8	4.410.800.052	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita (%)	45,53	45,75		45,95		45,97		45,99		46,03			
	Indeks lansia berdaya (Angka)	57,83	58		58,1		58,2		58,3		58,4			
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				244.681.650		247.666.507		306.978.732		388.314.652		391.400.052		
Terlaksannya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	3	3	244.681.650	3	247.666.507	3	306.978.732	3	388.314.652	3	391.400.052		
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	60	80		80		90		100		100			
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	60	80	15.000.000	80	20.000.000	90	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		28.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	3	3	28.800.000	3	28.800.000	3	28.800.000	3	28.800.000	3	28.800.000		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				70.881.650		68.866.507		123.178.732		199.514.652		202.600.052		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	12	12	70.881.650	12	68.866.507	12	123.178.732	12	199.514.652	12	202.600.052		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				4.019.400.000		4.019.400.000		4.019.400.000		4.019.400.000		4.019.400.000		
Terlaksannya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	19,347	19,347	4.019.400.000	19,347	4.019.400.000	19,347	4.019.400.000	19,347	4.019.400.000	19,347	4.019.400.000		
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	100	100		100				100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)													
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1.827.000.000		1.827.000.000		1.827.000.000		1.827.000.000		1.827.000.000		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	100	100	1.827.000.000	100	1.827.000.000		1.827.000.000	100	1.827.000.000	100	1.827.000.000		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				2.192.400.000		2.192.400.000		2.192.400.000		2.192.400.000		2.192.400.000		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	19,347	19,347	2.192.400.000	19,347	2.192.400.000	19,347	2.192.400.000	19,347	2.192.400.000	19,347	2.192.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)			0		0		0		0		0		

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Berdasarkan tabel 4.3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang terdiri dari 5 program serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DPPAPKB), memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 'Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota dan Program Strategi Nasional.seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini .

Tabel. 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
4.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
5.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Tabel 4.5
Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kabupaten/Kota

No	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran						OUTCOME/ OUTPUT
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	1. Program Perlindungan Perempuan kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200	10.000.000	10.007.000	10.146.097	10.336.844	10.344.079	Tersedianya Tempat Perlindungan yang Aman dan Layak bagi korban kekerasan
		1. Program Peningkatan kualitas keluarga kegiatan :Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kotata	0	252.857.700	256.372.422	261.192.224	261.375.058	262.000.000	

No	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran						OUTCOME/ OUTPUT
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaa Sub Kegiatan :Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.007.000	10.146.097	10.336.844	10.344.079	
2	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	1. Program Perlindungan Perempuan kegiatan :Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	42.842.200	10.000.000	10.007.000	10.146.097	10.336.844	10.344.079	Pemberian bantuan hukum, pendampingan psikologis dan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
		1. Program Peningkatan kualitas keluarga kegiatan :Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan	252.857.700	252.857.700	256.372.422	261.192.224	261.375.058	262.000.000	

No	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran						OUTCOME/ OUTPUT
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
		2.Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaa Sub Kegiatan :Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.007.000	10.146.097	10.336.844	10.344.079	

TABEL 4.6
DAFTAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

N O	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03-2.03.01 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.096.607.000	2.101.733.492	2.101.733.492	2.204.697.880	2.204.697.880	
			2.14.03.2.03.000 1 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	33.300.000	distribusi dan penyediaan alat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan dan jejaringnya untuk pelayanan KB
			2.14.03.2.03.000 3 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	2.063.307.000	2.068.433.492	2.068.433.492	2.171.397.880	2.171.397.880	Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

			Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						(MKJP)dalam moment strategis untuk Masyarakat miskin
		2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	215.881.650	218.866.507	278.178.732	359.514.652	362.600.052	
			2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	advokasi, KIE menuju keluarga berkualitas bagi kelompok PIK Remaja dalam kehidupan persiapan berkeluarga
			2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	Pengadaan alat permainan Eduktif /APE berupa BKB KIT Stunting BAGI

			BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						Kelompok BKB , dalam rangka percepatan penurunan stunting
			2.14.04.2.01.001 7 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	70.881.650	68.866.507	123.178.732	199.514.652	202.600.052	pemilihan Duta Genre (Generasi Berencana) dan pembinaan kelompok Bina Keluarga (BKB,BKR,BKL dan UPPKA)
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.019.400.000	4.019.400.000	4.019.400.000	4.019.400.000	4.019.400.000	
			2.14.04.2.02.000 5 - Pemantauan Data dan Informasi	1.827.000.000	1.827.000.000	1.827.000.000	1.827.000.000	1.827.000.000	pemberian pulsa dan biaya operasional

			Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						untuk Tim Pendampingan Keluarga (TPK) untuk pendampingan Keluarga Berisiko Stunting
			2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.192.400.000	2.192.400.000	2.192.400.000	2.192.400.000	2.192.400.000	Pemberian Honor untuk Tim Pendampingan Keluarga (TPK)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 telah masuk di sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terdapat Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota dan Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota dan dukungan terhadap program strategis nasional.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah diukur melalui suatu ukuran penilaian yang mampu menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah pada akhir periode Rencana Strategis. Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja disusun atas dasar akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan pada DPPPAPPKB.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada akhir periode perencanaan pembangunan. Penetapan indikator kinerja utama yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung tahun 2026-2030 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPPKB

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,22	0,21	0,201	0,191	0,182	0,172	0,162	
2.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,17	63,98	64,79	65,6	66,41	66,63	68,07	
3.	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	74,28	74,31	74,35	74,5	74,68	74,8	74,95	
4..	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,8	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	
6.	TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)	Angka	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
7.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	68,16	70,05	71,65	71,7	71,85	71,97	72	
8.	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	85,18	85,2	85,45	85,76	85,81	85,92	86	

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran DPPPAPPKB pada akhir periode perencanaan diukur dengan indikator :

1. Indeks Ketimpangan Gender

Merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ketimpangan gender terjadi dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Pada tahun 2024, nilai IKG Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 0,22 yang berarti masih terdapat ketimpangan gender sedang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Dibandingkan tahun 2023 yang bernilai 0,192 terjadi kenaikan ketimpangan yang mencerminkan perbaikan akses dan peluang bagi perempuan..

2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)

Merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan keluarga berdasarkan tiga dimensi

utama, yaitu kemandirian, kebahagiaan, dan ketangguhan keluarga.

Pada tahun 2024, nilai iBangga Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 63,17, yang termasuk dalam kategori sedang. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 62,08.

3. Indeks Pemberdayaan Gender

Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di suatu negara atau daerah. Indeks ini menyoroti kesenjangan gender dalam hal partisipasi, akses, dan kontrol terhadap sumber daya serta posisi pengambilan keputusan.

Pada Tahun 2024, nilai Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Temanggung sebesar 74,28 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10,05

4. Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak

Merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kerentanan perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, yang melapor dan ditangani DPPAPPKB .

Pada tahun 2024, rasio pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung yang dilaporkan dan ditangani tercatat sebesar 15 orang terdiri dari 9 kasus anak perempuan dan perempuan dan 6 kasus anak ,dan dari sejumlah kasus yang melapor tersebut 100 % tertangani .

5. Laju Pertumbuhan Penduduk

Di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,80% yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran serta masuknya penduduk dari wilayah lain (migrasi). Jika tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar seperti pendidikan,

kesehatan, dan perumahan, maka pertumbuhan ini dapat menimbulkan tekanan terhadap kapasitas pelayanan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi pengendalian kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana, serta memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kependudukan agar pertumbuhan penduduk tetap sejalan dengan daya dukung dan daya ndicat wilayah.

6. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)

Merupakan ndikator yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Pada tahun 2024, Capaian TFR dikabupatn Temanggung selama kurun waktu 5 tahun ini semakin menurun atau semakin membaik. Dari capaian tahun 2024 tercapai 1,55, artinya seorang wanita usia antara 15–49 thun, rata rata anak yang dilahirkan antara 1- 2 anak.

TFR yang masih tinggi ini dapat berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dalam jangka panjang, serta berpotensi memberikan tekanan terhadap ndica pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya TFR antara lain adalah masih tingginya angka pernikahan usia dini, keterbatasan akses terhadap layanan KB yang berkualitas, serta norma ndica yang masih mendorong keluarga besar.

7. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Menjadikan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai sasaran strategis perangkat daerah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Melalui AKIP, setiap program dan kegiatan diarahkan agar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, berorientasi pada hasil, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik.

Untuk Tahun 2024 nilai SAKIP DPPPAPPKB , tercapai 68,16 , hal ini belum sesuai harapan .

8. Nilai IKM Perangkat Daerah

Menjadikan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** sebagai sasaran strategis perangkat daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. IKM merupakan instrumen penting untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, mencakup aspek kecepatan, ketepatan, keterjangkauan, kemudahan, serta sikap aparatur dalam memberikan layanan. Untuk capaian IKM Tahun 2024 sebesar 85,16. hal ini sudah sesuai harapan , dan dengan harapan akan meningkat sesuai target yang ditentukan.

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai indikator yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat lintas indikator berdasarkan pada hasil analisis atas evaluasi capaian kinerja indikator kinerja utama daerah, serta permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum.

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci DPPPAPPKB

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.08 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	positif	%	8,22	9,21	9,7	10	10,2	10,4	10,5	
3.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	negatif	Angka	56,393	5,39	5,15	4,9	4,66	4,41	4,17	
	2.14 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
5.	Angka Kelahiran total (TFR)	negatif	%	1,55	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
6.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	positif	%	77,5	77,7	77,8	78,25	78,45	79,75	80	
7.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	negatif	%	7,6	7,59	7,58	7,57	7,56	7,55	7,54	

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur utama dalam sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di instansi pemerintah. Adapun IKK DPPPAPPKB meliputi:

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD
- Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan nilai dari Persentase Perangkat Daerah dalam menyusun rencana Kegiatan Anggaran yang responsif Gender. Pada Tahun 2024 realisasi indikator ini tercapai 8,22%, namun realisasi ini turun dari tahun 2023 sebesar 10,8 %. Dengan capaian ini menunjukkan belum adanya komitmen Perangkat Daerah tentang perlunya penyusunan ARG ini, oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas dan pembinaan oleh pokja PUG tingkat Kabupaten.
2. Presentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait tingkat Kabupaten
- Pada tahun 2024 dari 9 kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat di Kabupaten Temanggung, sebanyak 9 kasus (100 %) berhasil ditangani oleh instansi terkait, baik

melalui proses hukum, pendampingan psikologis, maupun rehabilitasi sosial. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas sistem perlindungan anak, meskipun tantangan masih ada pada aspek pelaporan dan jangkauan layanan.

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan yang mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk termasuk fisik, seksual, psikologis, ekonomi maupun eksploitasi. Capaian indikator ini di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebanyak 12 perempuan (29,48) per 100.000 perempuan, kondisi ini lebih tinggi pada tahun 2023 sebanyak 5 orang atau 1,81 .

4. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)

Merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Pada tahun 2024, capaian TFR di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun ini semakin menurun atau semakin membaik. Dari capaian tahun 2024 tercapai 1,55, artinya seorang wanita usia antara 15–49 tahun, rata rata anak yang dilahirkan antara 1-2 anak.

TFR yang masih tinggi ini dapat berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dalam jangka panjang, serta berpotensi memberikan tekanan terhadap sistem pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya TFR antara lain adalah masih tingginya angka pernikahan usia dini, keterbatasan akses terhadap layanan KB yang berkualitas, serta norma sosial yang masih mendorong keluarga besar

5. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi modern adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP. Capaian pada

pahun 2024 sebesar 82% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023 yaitu 81,85%.

6. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Unmetneed merupakan jumlah pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak ber-KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). Adapun data PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) tahun 2024 sebesar 7,43% lebih baik dari tahun 2023 8,62%.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang/urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang/urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA DPPPAPPKB serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DPPPAPPKB merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang/urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan atau target kinerja sasaran DPPPAPPKB.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra DPPPAPPKB yang dijabarkan dalam Renja dan RKA DPPPAPPKB harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) DPPPAPPKB. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja DPPPAPPKB dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat

Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Rentra DPPPAPKB ini.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA DPPPAPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700730 199001 2 002